

F. Pendanaan

1. Sumber Dana

Terdapat dua sumber dana yang dikucurkan oleh tingkat universitas ke tingkat program studi, yaitu dana yang bersumber dari DIK-S (dana dari masyarakat) dan DIP (dana proyek/dana pembangunan dari pemerintah). Meskipun pada tingkat universitas, UPI memiliki tiga sumber dana, yaitu DIK, DIP, dan DIK-S.

Mulai tahun 2005 sumber dana DIK (dana rutin dari pemerintah) dan DIP digabungkan dan disebut sumber dana yang disebut dengan DIPA. Dana DIK terutama dipakai untuk penggajian dosen dan karyawan lainnya dan pengelolaannya bukan merupakan wewenang Prodi.

Dana tahunan, yang diterima oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berfluktuasi sesuai dengan pemasukan yang diterima UPI. Pada tahun anggaran 2004/2005, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memperoleh Rp 40.016.000,- bersumber dari DIK-S dan Rp. 4.000.000,- dari DIP sehingga total dana yang diperoleh adalah Rp 44.416.000,- (*Lampiran: Program Anggaran Terpadu Tahun 2005*). Pada kenyataannya dalam perjalanan suatu tahun anggaran, selain memperoleh dana DIK-S dan DIP sebuah program studi bisa memperoleh juga kucuran dana lain. Misalnya menjelang akhir tahun anggaran 2004/2005 UPI mengucurkan dana sekitar 4 juta rupiah kepada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari DBO (Dana Bantuan Operasional).

Dalam Rakerda UPI 2005/2006, pihak rektorat mengumumkan bahwa jumlah dana yang akan diturunkan kepada unit-unit kegiatan meningkat disesuaikan dengan jumlah mahasiswa terdaftar di program studi masing-masing. Peningkatan kucuran dana untuk Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia pada tahun anggaran 2005/2006 berkisar lebih dari dua kali dana yang diterima Prodi pada tahun 2004/2005.

Dengan berubahnya UPI menjadi sebuah PT BHMN, Prodi dapat menghasilkan dana tambahan selain yang dikucurkan oleh UPI. Peluang untuk menghasilkan dana tambahan terbuka cukup lebar bagi Prodi mengingat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang tengah diminati oleh orang asing. Pembuatan kerangka aturan yang lebih jelas dan memberdayakan jurusan/prodi dan juga menguntungkan UPI saat ini sedang terus diupayakan agar pengelolaan keuangan

diorientasikan pada kebutuhan setiap unit kerja di lingkungan UPI.

2. Sistem Alokasi Dana

Dana yang diperoleh Prodi dibelanjakan sesuai dengan alokasi yang sudah dirancang sebelumnya. Sejak tahun, 2002 UPI menyelenggarakan kegiatan rapat dinas tahunan yang disebut Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang kemudian disebut Rapat Kedinasan Lingkungan UPI. Dalam kegiatan rapat kedinasan tersebut, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merancang program kegiatan untuk satu tahun yang disebut *Rencana Kerja Tahunan* (RKT). Dalam RKT itu, selain disebutkan jenis-jenis program kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan, diusulkan juga alokasi biaya yang dibutuhkan untuk tiap kegiatan (*Lampiran: Rencana Kinerja Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2005*),

Penentuan alokasi biaya tersebut dibicarakan di tingkat Prodi sebelum akhirnya diusulkan kepada pihak Rektorat. Selain mempertimbangan masukan-masukan yang muncul dalam pembahasan rapat dewan dosen, alokasi dana yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dimanfaatkan juga sebagai bahan perbandingan untuk menetapkan alokasi tahun anggaran yang akan berjalan. Dalam kaitan ini, UPI memberikan kebebasan kepada program studi untuk menentukan suatu program unggulan yang tentu berimbang pada jumlah pengalokasian dananya.

3. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana

Dana yang dikucurkan universitas untuk satu tahun anggaran dikelola berdasarkan aktivitas (*activity-based*) yang telah disetujui RKT-nya oleh universitas. Dana dikelola untuk mendukung pelaksanaan tujuh kelompok program dalam Program Anggaran Terpadu Unit Kerja. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang meliputi (1) Akademik, (2) SDM, (3) Penelitian dan Pengembangan, (4) Pengabdian pada Masyarakat, (5) Organisasi dan Manajemen, (6) Kemahasiswaan, dan (7) Kerjasama Nasional dan Internasional (*Lampiran: Program Anggaran Terpadu Tahun 2005*).

Dana yang diterima dari universitas selanjutnya disimpan dalam rekening bank atas nama Ketua Jurusan dan langsung didistribusikan pada Sekretaris Jurusan dan Para Ketua Prodi. Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hanya satu pimpinan saja yang berhak mengeluarkan dana setelah berkoordinasi dengan pimpinan lainnya (Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi). Dana diambil sesuai dengan kebutuhan untuk dipakai sesuai peruntukannya. Ketua Program Studi dapat mengeluarkan dana untuk membiayai aktivitas kegiatan yang sejalan dengan kegiatan tahunan yang sudah ditetapkan melalui persetujuan Ketua Jurusan. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana menjadi tanggung jawab bersama para pimpinan Jurusan. Ketua Jurusan, berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, berkewajiban setiap tahunnya melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia melalui Fakultas.

4. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya

Sejauh ini sumber finansial utama penopang kegiatan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah dari DIP dan DIK-S yang tercermin pada Program dan Anggaran Terpadu Universitas Pendidikan Indonesia Unit Kerja Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dana-dana tersebut digunakan secermat mungkin dengan mekanisme pengelolaan seperti yang telah digambarkan.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dalam jangka panjang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia diharapkan mampu pula membiayai biaya operasional dari sumber-sumber lain yang potensial, seperti kerja sama dengan lembaga lain. Dengan status UPI sebagai PT BHMN, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dimungkinkan untuk turut menghasilkan pemasukan atau *income generating*. Mengingat status bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diminati oleh masyarakat internasional, peluang untuk mampu mewujudkan tujuan tersebut terbuka lebar. Selain itu, banyak keahlian dosen yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pemasukan bagi Prodi, di antaranya dalam bidang penulisan, penyuntingan, dan grafis. Kondisi

ini diharapkan mampu menjelmakan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai sebuah program studi yang mandiri dan bahkan dapat ikut membantu pengembangan institusi..

Tabel F1
Deskripsi SWOT Komponen Pendanaan

Kekuatan (<i>Strengths</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem anggaran terpadu yang pengelolaannya akuntabel dan transparan meminimalkan kemungkinan tumpang tindih alokasi dana. 2. Anggaran dialokasikan berdasarkan aktivitas yang sudah dibahas dan ditetapkan untuk satu tahun ke depan sehingga dana yang digunakan lebih terkontrol. 3. Mekanisme pengeluaran dana dapat meminimalkan penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 4. Jumlah nominal dana yang diterima prodi cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana terkadang dikeluarkan untuk suatu kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar kegiatan tahunan. 2. Ada keterbatasan dana yang dikucurkan universitas untuk bisa memaksimalkan kinerja Prodi.
Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan status UPI menjadi BHMN membuka peluang bagi Prodi untuk mengusahakan pemasukan finansial dari sumber lain (<i>income generating</i>). 2. Dengan status Bahasa Indonesia yang memiliki peran dan fungsi strategis, peluang kerjasama yang menghasilkan dana terbuka lebar. 3. Dengan diundangkannya UU Guru dan Dosen, terbuka peluang besar bagi Prodi untuk memperoleh jumlah dana yang bisa lebih leluasa dipakai untuk mengembangkan dan memberdayakan Prodi.

Ancaman (*Threats*)

1. Peluang memperoleh dana lebih besar bisa berbalik menjadi ancaman kalau tidak diantisipasi pengelolaannya dengan baik.
2. Pemberdayaan Prodi akan membutuhkan dana banyak yang harus diwaspadai oleh pimpinan.
3. Distribusi dana antara universitas, fakultas dan Prodi apabila tidak diterapkan secara proporsional dan logis dapat berbalik menjadi ancaman yang menciptakan suasana tidak produktif.